



**KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**

**SERTIFIKAT PELATIHAN**

NOMOR: SDM-SM.02.03-010144

Kementerian Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, serta ketentuan pelaksanaannya menyatakan bahwa:



Nama : Qadli Iyaldi, S.H.  
NIP : 200004142025061012  
Tempat/ Tanggal Lahir : Jakarta, 14 April 2000  
Pangkat/Golongan Ruang : Penata Muda, III/a  
Jabatan : Analis Hukum Ahli Pertama  
Instansi/Unit Kerja : Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual  
Kualifikasi : MEMUASKAN

**LULUS**

pada Pelatihan Teknis Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Penyusunan Peraturan Kebijakan Angkatan II Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dari tanggal 25 Februari 2026 sampai dengan tanggal 11 Maret 2026 di Depok yang meliputi 59 jam pelajaran.

Depok, 11 Maret 2026  
Kepala Badan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia Hukum,

Gusti Ayu Putu Suwardani

## DAFTAR MATA PELATIHAN

1. Ceramah: Pembinaan Ideologi Pancasila (2 OJ)
2. Ceramah: Konsep Dasar HAM (2 OJ)
3. Kebijakan Pengembangan SDM dan Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Internalisasi Nilai-nilai Pancasila (3 JP)
4. Overview: Pelatihan Teknis Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Penyusunan Peraturan Kebijakan bagi Analis Hukum (3 JP)
5. Dinamika Kelompok/*Building Learning Commitment (BLC)* (3 OJ)
6. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Penyusunan Peraturan Kebijakan dalam perspektif HAM (3 JP)
7. Prinsip-prinsip Regulasi dalam Perspektif Perlindungan Kekayaan Intelektual (3 JP)
8. Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (4 JP)
9. Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan (Legislasi Semu) (4 JP)
10. Pengharmonisasian Peraturan Perundang-undangan (3 JP)
11. Perumusan Norma (4 JP)
12. Teknik Penyusunan PUU I (Kerangka Peraturan Perundang-undangan) (4 JP)
13. Teknik Penyusunan PUU II (Hal-hal Khusus) (4 JP)
14. Teknik Penyusunan PUU III (Ragam Bahasa Peraturan Perundang-undangan) (4 JP)
15. Teknik Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan (5 JP)
16. Pengawasan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah (4 JP)
17. Pengujian Peraturan Perundang-undangan (4 JP)

Depok, 11 Maret 2026  
Kepala Pusat Pengembangan  
Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan,

Mutia Farida